**Siaran pers Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas tentang Penyelenggaraan Asian Paragames 2018 dan Amanat pembentukan Komisi Nasional Disabilitas**

**ASIAN PARAGAMES 2018:**

**POTRET KEGAGALAN PEMERINTAH INDONESIA MELAKSANAKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Asian Paragames 2018 menjadi ajang pembuktian bagi Negara Indonesia bagaimana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara ini dilaksanakan. Ribuan perhatian warga Asia tertuju ke Indonesia ingin melihat bagaimana atlit-atlit kebanggaan negara mereka berlaga dalam suatu event internasional.

Hasilnya, setelah berjalan hampir satu minggu, dengan persiapan pada minggu-minggu sebelumnya, memperlihatkan bagaimana warga negara negara dengan disabilitas masih tidak setara di Indonesia. Pelaksanan event internasional sekelas pesat olahraga se-Asia masih menampilkan wajah stigma negative dan aksesibilitas yang tidak terpenuhi, sehingga berujung kepada praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk para atlit, penonton, dan relawan.

Stigma negative ditunjukan pada awal perhelatan Asian Paragames 2018 yang kerap menonjolkan kekurangan dari para atlet disabilitas, alih alih menunjukan prestasi dan semangat juang para atlit tersebut. Kalimat seperti “Kehilangan kaki untuk temukan semangat ukir prestasi dahsyat”, atau “Para penembus batas”, menunjukan bahwa perspektif yang digunakan masih melihat kekurangan fisik seseorang, tidak langsung melihat semangat dan prestasi secara setara dengan para atlit lainnya yang non disabilitas. Selain itu, pemberitaan di media yang kerap masih menggunakan istilah cacat atau narasi lain yang bersifat mengasihani, secara tidak langsung menutupi semangat membela nama negara Indonesia dengan rasa belas kasihan.

Kejadian gagal bertandingnya atlit-atlit Indonesia di dua cabang olahraga, yaitu Judo dan Renang merupakan bukti dari lemahnya pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dua kegagalan itu disebabkan karena adanya ketidakpahaman terhadap regulasi dan jadwal persiapan pertandingan, yang sangat mendasar untuk dikuasai oleh Atlit dan para pengurus olahraga. Potret ini bias jadi adalah fenomena gunung es, yang masih menyisak hian berbagai persoalan yang tersembunyi.

Permasalahan lain adalah terkait dengan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang merupakan hal mendasar untuk penyediaan akomodasi yang layak agar para atlit, penonton, dan relawan disabilitas dapat menjalankan perannya masing-masing secara maksimal. Penyediaan aksesibilitas sudah diupayakan sebelum pelaksanaan kegiatan, tetapi pemahaman dan keberpihakan yang lemah menjadikan penyediaan aksesibilitas berjalan lambat dan terkesan asal ada, karena anggaran yang minim dan mengerjakan dalam waktu yang mepet. Padahal aksesibilitas adalah kebutuhan mendasar sekaligus elemen paling utama yang menunjukan apakah penyelenggara berkomitmen kuat dalam melaksanakan event bagi penyandang disabilitas, atau sekadar menjadikan para penyandang disabilitas sebagai obyek.

Penyiapan aksesibilitas itu seharusnya dilaksanakan sejak persiapan Asian Games 2018 diselenggarkaan, atau bahkan sudah disiapkan sejak awal dibangunnya setiap venue olahraga, karena penyandang disabilitas harus diberi ruang untuk ikut menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Hal itu menunjukan sekali lagi, bahwa kehadiran warga negara dengan disabilitas di Indonesia belum menjadi prioritas, bahkan kerap terdiskriminasi.

Perhelatan Asian Paragames 2018 sudah cukup membuktikan bahwa upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih sangat jauh dari harapan. Perhatian dan solidaritas dari berbagai elemen ternyata masih belum menghasilkan sesuatu yang konkrit apabila belum ada dukungan dari otoritas Pemerintah.

Dalam pembukaan Asian Paragames 2018 sudah disimulasikan dengan baik bagaimana Presiden Republik Indonesia memanah huruf “Dis” sehingga menjadikan “disability” menjadi “ability”. Adegan itu harusnya dimaknai bahwa Pemerintah memang menjadi pihak yang paling betanggung jawab dan mampu memangkas hambatan-hambatan yang ada dibalik berbagai kemampuan dari para penyandang disabilitas.

Upaya tersebut harus dilakukan seara progresif dan luar biasa, tidak hanya biasa-biasa saja. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah membangun terobosan dalam birokrasinya, yaitu membangun lembaga yang fokus dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lembaga itu juga sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND).

KND kedepan akan memastikan setiap ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan baik oleh para Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah. KND juga akan melihat permasalahan dan kemajuan secara komprehensif, sehingga memerlukan kewenangan yang kuat dan posisi yang setara dengan Kementerian dan Lembaga, dan memiliki kewenangan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kami Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk:

1. Melakukan evaluasi mendasar dan merumuskan upaya tindak lanjutnya dari pelaksanaan Asian Paragames 2018, terutama yang terkait dengan upaya anti-stigma negative terhadap Atlit  penyandang disabilitas dan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga perlu intervensi pemerintah terhadap organisasi pengelolaa olahraga Disabilitas;
2. Membuka partisipasi penuh dari penyandang disabilitas untuk terjun langsung dalam pelaksanaan upaya Pemerintah untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
3. Membentuk Komisi Nasional Disabilitas segera, sebelum 2019, yang berkedudukan setara dengan Kementerian/Lembaga, dan memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas.

**Tuntutan ini kami ajukan kepada Presiden Republik Indonesia tanpa mengurangi rasa bangga kami terhadap atlit-atlit Asian Paragames 2018 yang sedang berjuang membela nama Negara Indonesia. Selamat berjuang, dan terus harumkan nama Indonesia di tingkat Asia dan dunia.**

**Narahubung :**

1. Ariani Soekanwo (PPUA Disabilitas) : 081318907184)
2. Maulani Rotinsulu (HWDI : 08128253598)
3. Aria Indrawati (Pertuni : 081511478478)
4. Yeni Rosa Damayanti (PJS : 081282967011)
5. Mahmud Fasa (FKPCTI : 081808363744)
6. Bambang Prasetyo (Gerkatin : 08176733250)
7. Fajri Nursyamsi (PSHK : 0818100917)

**Jakarta, 12 Oktober 2018 Gelora Bung Karno**